



## EKSISTENSI INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN DAERAH

Sri Kunarsih & Tampilen

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

### Abstract

*Regional autonomy gives areas the power to choose their own policies and development paths, including education. To acquire a true picture of area realities, regional independence is required. Large-scale exploitation has resulted in the neglect of regional education development. As a result, there is a natural resource and human resource imbalance in the regions. Educational institutions have an important part in the development of people's minds and creativity. The goal is to enhance education's role in promoting higher-quality change. This research takes a qualitative approach while doing descriptive research. This research tries to provide an overview by presenting a profile (issue) or an outline of the stages to answer questions like who, when, where, and how.*

*Keywords: Educational institutions; regional autonomy; development; change.*

### Abstrak

Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi daerah untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunannya, termasuk pendidikan. Kemandirian daerah diperlukan untuk mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah. Eksploitasi secara besar-besaran menyebabkan pembangunan pendidikan daerah terabaikan. Akibatnya terjadi ketimpangan di daerah terkait SDA dan SDM. Institusi pendidikan berperan dalam mengembangkan kreativitas dan pikiran masyarakat. Tujuannya untuk memperkaya peran pendidikan dalam perubahan yang lebih berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata untuk menyajikan profil (persoalan), atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana dan bagaimana. Kata Kunci: Institusi pendidikan; otonomi daerah; pembangunan; perubahan.

## PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai pranata sosial sangat berperan proses perubahan dalam masyarakat. Secara konseptual, pendidikan dan masyarakat merupakan hal yang saling berinteraksi. Pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara analisis sistem, pendidikan adalah sub sistem yang berkaitan dengan ekonomi, politik, budaya, pembangunan, dan sebagainya. Dengan kata lain, setiap perubahan yang terjadi akan berpengaruh pada sub sistem lainnya. Pendidikan yang baik, seharusnya mampu merespons setiap perubahan yang sedang dan akan terjadi. Sehingga, pendidikan memiliki nilai signifikan pada setiap proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat (Buchori, 1995, p. 49).

Signifikansi pendidikan semakin menghangat dibicarakan saat masyarakat mengalami perubahan politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Puncaknya, saat diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Akibatnya terjadi perubahan terhadap paradigma dan sistem pendidikan nasional. Semuanya diarahkan untuk mampu merespons, berperan, dan memiliki makna terhadap setiap dinamika masyarakat. Pemberlakuan Otonomi Daerah tahun 2001, menyebabkan pengelolaan lembaga pendidikan memiliki caranya sendiri. Dalam hal ini peran masyarakat dan daerah dilibatkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada saat kebijakan ini dilaksanakan, terdapat perubahan mendasar yang berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan. Agar

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-08-03 | Revised: 2021-08-16 | Accepted: 2021-08-17 | Published: 2021-09-15

HOW TO CITE (APA 6<sup>th</sup> Edition):

Kunarsih, S. & Tampilen. (2021). Eksistensi Institusi Pendidikan dalam Pembangunan dan Perubahan Daerah. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 5(2), 233-238.

\*CORRESPONDANCE AUTHOR: [sri.kunar@gmail.com](mailto:sri.kunar@gmail.com) | DOI: <https://doi.org/10.30743/mukadimah.v5i2.4079>



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

perubahan struktur dapat dilakukan secara tepat, perlu dilakukan perencanaan yang baik (Purba, 2017, pp. 2–3).

Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan serta pengawasan. Tujuannya adalah pemerintah menciptakan strategi dan inovasi dalam melaksanakan pada daerah masing-masing. Hal ini membuka peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Untuk itu perlu adanya dukungan sumber daya yang memadai, pendanaan yang cukup, sinergitas dan komitmen antar *stakeholder* terkait pertanggungjawaban administratif (Hidayat, 2016, p. 36).

Otonomi daerah membuka peluang lebih bebas bagi daerah untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunannya. Sumber daya alam (SDA) yang besar tanpa dukungan SDM yang andal menjadikan proses pembangunan tidak efektif dan efisien. Keduanya harus saling dukung dan menjadi faktor utama kemajuan pembangunan. Namun, banyak daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kelangkaan SDM yang andal. Tentunya hal tersebut menjadi penghambat lajunya pembangunan di daerah. Hal ini telah menjadi kekhawatiran banyak kalangan ketika proses otonomi daerah digulirkan. Bagi daerah yang mampu mempersiapkan dan mengarahkan fokus perhatian pada bidang pendidikan yang akan mampu mengatasi masalah ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata untuk menyajikan profil (persoalan), atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana dan bagaimana. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Neuman, 2013, pp. 2–3).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

Otonomi daerah merupakan kewenangan dari daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut berdasarkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam kebijakan otonomi daerah juga berisi tentang hak dan kewajiban bagi pemerintah daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 14 tentang urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan yang dimaksud berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi dan potensi setempat (Hidayat, 2016, pp. 38–39).

Munculnya otonomi daerah ini dilandasi oleh berbagai pemikiran sebagai berikut:

1. Wilayah Indonesia yang secara geografis sangat luas dan beraneka ragam.
2. Aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras, dan etnik serta bahasa, disebabkan antara lain oleh perbedaan sejarah perkembangan penduduk dengan segala aspeknya.
3. Besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi sekolah/madrasah yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan dan sosial budaya.

4. Perbedaan lingkungan yang mungkin saja menimbulkan aspirasi dan gaya hidup yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya.
5. Perkembangan sosial politik ekonomi-budaya-agama yang cepat dan dinamis menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis (Jalal and Supriyadi, 2001, p. 2).

Otonomi di bidang pendidikan memberikan keleluasaan pada sekolah dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini menuntut manajemen agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan serta mendukung pembangunan. Dalam prosesnya desentralisasi pendidikan sangat membutuhkan peran masyarakat di daerah-daerah untuk menghasilkan *output* yang diinginkan. Hal ini terkait 3 alasan utama, Pertama, terkait kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Ketiga, terkait hak demokratis untuk menentukan ide dan saran dalam penyelenggaraannya (Aswasulasikin, Dwiningrum, and Sumarno, 2015, p. 2).

Dalam perspektif pendidikan, otonomi daerah identik dengan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan. Dalam pengelolaannya dilakukan oleh unit atau pejabat di bawahnya, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ataupun dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan performa di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Secara garis besar hal ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, seperti pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan, dan efektivitas/efisiensi pengelolaan (Arifuddin, 2014, p. 42).

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan bagi pelaksanaan pemerintah di era otonomi daerah. Terkait dengan hal tersebut terdapat 3 hal yang menjadi perhatian, yaitu; 1) pembangunan masyarakat yang demokratis, 2) pengembangan sosial kapital, dan 3) peningkatan daya saing bangsa. Ketiga hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan. Tujuannya adalah untuk membebaskan diri dari kebodohan dan keterbelakangan serta mewujudkan masyarakat yang demokratis. Nantinya kemampuan yang dimiliki digunakan untuk memberantas kemiskinan di daerah (Putera, 2015, p. 32).

Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah. Hal ini dilakukan untuk mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah. Selain itu, membentuk pribadi yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif. Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu:

1. Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik).
2. Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah.

Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Sedangkan, konsep kedua memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dengan motivasi meningkatkan kualitas pendidikan (Hasbullah, 2007, pp. 30-31).

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dalam perjalanannya muncul fenomena yang mengesampingkan pendidikan. Hal ini dilihat dari menurunnya kualitas pendidikan. Penyebabnya tidak lain adalah adanya ketimpangan antara daerah yang memiliki dan tidak memiliki kemampuan SDA dan SDM. Dengan kata lain, tenaga pendidikan yang ada belum memiliki latar pendidikan sesuai

kebutuhan. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan nasional. Selain itu, faktor sedikitnya komponen aparat yang berlatar belakang bidang pendidikan juga mempengaruhi. Akibatnya pendidikan daerah tidak menjadi prioritas utama (Nasution, 2010, p. 2).

### **Peran Institusi Pendidikan Terhadap Pembangunan dan Perubahan Daerah**

Institusi pendidikan merupakan lembaga pendidikan yang menentukan mutu SDM bagi pembangunan. Mutu yang merata dan sesuai dengan kebutuhan wilayah sangat penting di era otonomi daerah. Hal ini dapat ditandai dengan kreativitas dan produktivitas yang diwujudkan dari hasil kerja nyata. Kedua hal tersebut dapat tercapai jika didasari dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Untuk mendapatkannya dapat melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Untuk itu, pemberdayaan bidang pendidikan merupakan suatu yang penting agar menghasilkan SDM yang bermutu (Purba, 2017, p. 2).

Otonomi daerah memerlukan dukungan sumber daya manusia dalam menggali potensi wilayah setempat. Konsekuensi dari kebutuhan tersebut adalah pemerintah daerah wajib meletakkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama. Hal ini berkaitan dengan SDM yang bermutu berasal dari pendidikan yang berkualitas pula. Meskipun pembangunan ini memakan waktu yang panjang dan biaya besar serta lama memetik hasilnya. Pembangunan pendidikan sebuah keharusan dengan prinsip berkelanjutan (Darmono and Restu, 2001, p. 13).

Percepatan laju pembangunan dan perubahan di daerah harus dimaknai dalam bingkai holistik serta integral. Jangan sampai proses dilakukan hanya mementingkan kepentingan jangka pendek dan melupakan kepentingan jangka panjang. Banyak terjadi di daerah agar laju pembangunan dinilai melaju cepat dan sukses, melakukan eksploitasi sumber daya alam dan potensi daerah secara besar-besaran. Di sisi lain pembangunan pendidikan masyarakat terabaikan demi mengejar target pembangunan fisik semata (Haji, Kiyai, and Pombengi, 2015).

Dalam rangka mendorong laju percepatan pembangunan daerah, pemerintah daerah wajib meletakkan pendidikan sebagai sektor andalan. Pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk menyambut dinamika perubahan dan laju pembangunan. Untuk itu, setiap komponen yang ada di daerah harus dilibatkan dalam upaya pemberdayaan pendidikan yang dilakukan. Terdapat empat unsur utama yang berperan dalam hal ini, yaitu:

1. Masyarakat Lokal, dalam hal ini masyarakat yang berada di daerah. Partisipasi mereka harus di hargai dan digalakkan, sebab menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Singkatnya masyarakat lebih menentukan kebutuhan-kebutuhan pembangunan pendidikan masyarakatnya.
2. Perguruan Tinggi di Daerah, perguruan tinggi harus menjadi motor penggerak pembangunan daerahnya. Lembaga ini harus lebih peka dan menyelaraskan diri dengan kebutuhan dan kepentingan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun dengan keterbatasan, hal ini menjadi potensial di tengah-tengah pembangunan masyarakat.
3. Lembaga Pemerintah di Daerah, lembaga ini harus mulai mengambil alih tugas desentralisasi dari pemerintah pusat. Perlunya perhatian yang serius dari pemerintahan daerah terhadap pembangunan pendidikan menjadi sebuah keharusan.
4. Lembaga Pendidikan, lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat diberi kebebasan dalam melaksanakan daya kritis serta cipta. Tujuannya agar pendidikan tidak kehilangan relevansi dengan realitas masyarakat di mana mereka hidup. Yang lebih penting lagi, lembaga ini memiliki peran nyata dalam proses perubahan dan pembangunan di daerah (Tilaar, 2004, p. 103).

Kebijakan otonomi daerah menjawab tuntutan lokal dan desakan yang mengarah pada arus global. Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat dan daerah yang beragam sangat rentan

terhadap perpecahan. Perubahan sosial, politik dan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang mudah dalam prosesnya. Perubahan ini memerlukan kesiapan mental yang baik dari seluruh komponen di dalamnya. Perlu adanya persiapan yang matang, terencana, saksama, bertahap, dan berkelanjutan.

Perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh institusi pendidikan. Lembaga ini harus mampu menjadi agen perubahan yang dapat memberikan dampak yang positif terhadap perubahan yang ada. Pendidikan berperan mengembangkan kreativitas dan pikiran masyarakat. Introduksi hal-hal baru serta produk perubahan masyarakat ke dalam pendidikan akan memperbesar peluang berkembangnya kreativitas peserta didik. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang terjadi akan memperkaya peran pendidikan dalam perubahan yang lebih berkualitas (Idris, 2013, pp. 65–66).

## SIMPULAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan dari daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perspektif pendidikan, otonomi daerah identik dengan desentralisasi pendidikan yang merupakan suatu keharusan bagi pelaksanaan pemerintah daerah. Kemandirian daerah harus diawali dengan faktor internal dan eksternal daerah untuk mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah. Namun, adanya ketimpangan antara daerah yang memiliki dan tidak memiliki kemampuan SDA dan SDM. Terjadinya eksploitasi secara besar-besaran menyebabkan pembangunan pendidikan daerah terabaikan. Hal ini demi mengejar target pembangunan fisik semata. Institusi pendidikan menjadi agen perubahan yang berperan mengembangkan kreativitas dan pikiran masyarakat. Proses pembelajaran yang terjadi akan memperkaya peran pendidikan dalam perubahan yang lebih berkualitas.

## REFERENSI

- Arifuddin, I. (2014). Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Risalah*, 1(1), 39–49.
- Aswasulasikin, Dwiningrum, S. I., and Sumarno. (2015). Tuan Guru Sebagai Tokoh Pembangunan Pendidikan di Pedesaan. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/JPPFA.V3I1.6669>.
- Buchori, M. (1995). *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Darmono, and Restu. (2001). Peta Kondisi Pendidikan di Sumatera Utara Dalam Menyongsong Otonomi Daerah. *Diskusi Panel Hardiknas*. IPBI Sumatera Utara.
- Haji, E., Kiyai, B., and Pombengi, J. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi di SMA/MA Kota Tidore Kepulauan). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(32), 1–13.
- Hasbullah. (2007). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, N. (2016). Otonomi Daerah Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Society*, 6(1), 35–50.
- Idris, R. (2013). Pendidikan Sebagai Agen Perubahan Masyarakat Indonesia Seutuhnya. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 16(1), 62–72. <https://doi.org/10.24252/LP.2013V16N1A5>
- Jalal, F., and Supriyadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Nasution, I. (2010). Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan. *Visipena*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.46244/VISIPENA.V1I2.25>.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (E. T. Sofia, trans.). Jakarta: Indeks.
- Purba, S. (2017). Pembangunan Daerah Melalui Pemberdayaan Pendidikan Pada Otonomi Daerah. *GENERASI KAMPUS*, 3(2), 1–17.
- Putera, R. E. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Dalam Pencapaian “Millennium Development Goals.” *MIMBAR*, 31(1), 229–239.

Tilaar, H. A. . (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

---

Copyright Holder ©Sri Kunarsih & Tampilen | Copyright Year 2021  
Licence URL <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>